

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stakeholder

Freeman (1984) dalam Mainardes *et al.* (2011) mengatakan bahwa suatu organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketika akan membuat atau mengambil keputusan strategis. Meskipun setiap peneliti berbeda dalam mendefinisikan *stakeholder theory*, prinsipnya tetap sama yaitu suatu organisasi atau entitas harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau yang akan dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Frederick *et al.*, 1992) dalam Mainardes *et al.*, 2011). Teori stakeholder pada dasarnya adalah teori bagi perusahaan sektor swasta. Akan tetapi kenyataannya sudut pandang dari teori ini dapat diterapkan pada sektor publik, dan sebagian diterapkan dalam konteks keputusan manajerial atau pemimpin dalam pemerintahan.

Penerapan teori *stakeholder* dalam organisasi/entitas sektor publik adalah sebagai salah satu tolok ukur apakah organisasi sektor publik sudah mampu menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders*. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apakah suatu pemerintahan sudah mampu untuk menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi yang berkualitas guna diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh *stakeholders*. Pelaporan keuangan pemerintah yang baik adalah laporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholders* (Sukmaningrum, 2012).

2.2 Decision Usefulness Theory

Decision Usefulness Theory atau teori kegunaan keputusan, informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat. Teori ini dikenal dengan nama lain yaitu

a theory of accounting to investors. Selain *FASB*, ada sebuah badan yang setara dengan *FASB* yaitu *GASB*. *FAF* membuat *GASB* pada tahun 1984 dalam hubungan “kakak-adik” dengan *FASB*. *GASB* bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan *FASB* menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non pemerintahan dan organisasi non profit.

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. *SFAC No. 2* tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). *FASB* menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan. Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan.

FASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya. Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan

(*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictive value*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*). (Freeman, 2008) dikutip dari penelitian Untary (2015).

Laporan keuangan bisa dikatakan baik apabila laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi pihak eksternal yang dijadikan acuan atau dasar dalam proses pengambilan keputusan baik jangka pendek maupun keputusan jangka panjang. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik. Untary (2015).

2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Suatu laporan keuangan dikategorikan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu diketahui bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masalalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode (Diani, 2014). Dikutip dari penelitian Adhi & Suhardjo (2013), Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang berguna (*useful*) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (*information content*). Laporan keuangan akan berguna (*useful*) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masalah atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*).

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap

Informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
 - a. Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). (Effendi, 2017).

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Adhi & Suhardjo, 2013).

2.5 Peran Auditor Internal

Audit Internal merupakan suatu fungsi yang ada dalam suatu organisasi yang berperan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas atau program di dalam organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisnya kegiatan atau program. Internal audit di Pemerintahan Daerah, dalam hal ini adalah inspektorat daerah memiliki peran sangat penting, yaitu sebagai pengawas intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 peran inspektorat adalah melakukan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya (Sari, 2014).

2.6 Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Dikutip dari penelitian Untary (2015), dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

2.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi *urgen* baik level pimpinan maupun staf pemerintahan (Syarifudin, 2014).

Menurut Warisno dikutip dari penelitian Windiastuti (2013), dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD sekarang dirubah menjadi OPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

2.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jugiyanto dikutip dari penelitian Ariesta (2013), pemanfaatan teknologi adalah perilaku karyawan dalam melakukan tugasnya yang berhubungan dengan

teknologi, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Jugiyanto juga mengatakan bahwa aplikasi teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Yosefrinaldi, 2013).

2.9 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Santoso, 2016).

Dikuti dari Penelitian Armando (2013), disebutkan bahwa unsur-unsur Sistem Pengendalian intern dalam Pemerintah yang meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian Intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai-nilai informasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindaklanjut hasil rekomendasi audit dan review lainnya.

2.10 Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

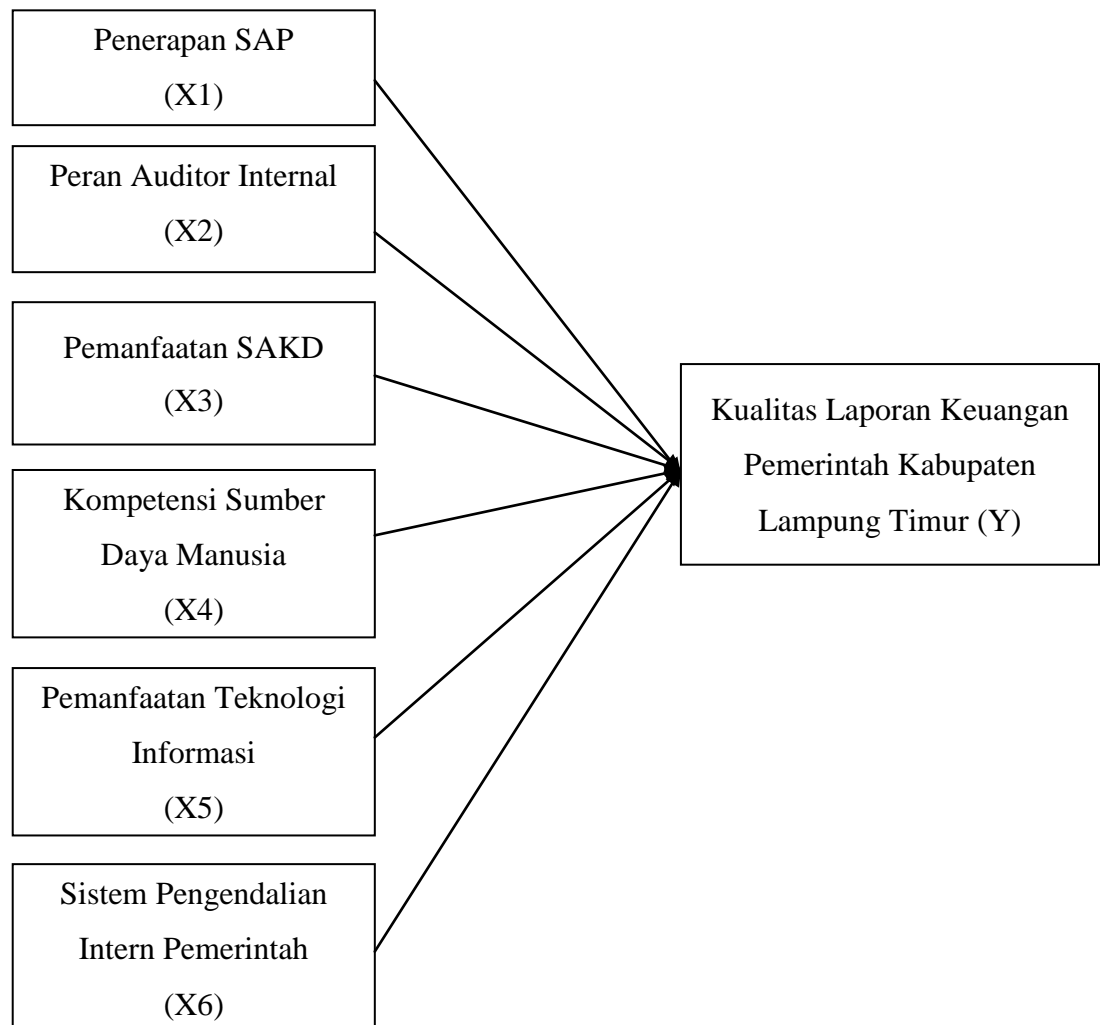
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	As Syifa Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD kota Depok)	Sumber daya manusia, penerapan SAK, Pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.
2.	Dian Irma Diani (2014)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Pariaman)	Pemahaman Akuntansi, Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Tidak Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3.	Lusi Novita Sari (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kapasitas Sumber Daya Manusia dan

		Dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD kabupaten Kerinci)	Peran Auditor Internal berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4.	Rizal Pramudiarta (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh pada Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah
5.	Feranisa Effendi (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah kota Bandar Lampung (Studi empiris pada SKPD Bandar Lampung)	Efektivitas Penerapan SAP, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Sedangkan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak

			Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
6.	Ulfa Rima Nugraheta (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Surakarta)	Kompetensi Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.11 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.12 Bangunan Hipotesis

2.12.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Lampung Timur

Menurut Ningtyas dikutip dari penelitian Effendi (2017), disebutkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut adalah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah (2014), menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Rima Nugraheta (2017), yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.12.2 Pengaruh Peran Auditor Internal Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Lampung Timur

Audit Internal merupakan suatu fungsi yang ada dalam suatu organisasi yang berperan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas atau program di dalam organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisnya kegiatan atau program. Internal audit di Pemerintahan Daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat daerah memiliki peran sangat penting, yaitu sebagai pengawas intern pemerintahan itu sendiri (Sari, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014), menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peran auditor internal pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.12.3 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Lampung Timur

Dikutip dari penelitian Yuliana (2016), mengatakan bahwa pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Untary (2015), menyatakan bahwa pemanfaatan SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014), yang menyatakan bahwa pemanfaatan SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₃: Pemanfaatan SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.12.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Lampung Timur

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi *urgen* baik level pimpinan maupun staf pemerintahan (Syarifudin, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudiarta (2015), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2016), juga menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga dengan hasil penelitian dari Kiranayanti & Erawati (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.12.5 Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sapitri dalam penelitian Effendi (2017), menyatakan bahwa dengan memanfaatkan teknologi, informasi keuangan menjadi berkualitas, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat berarti bebas dari suatu kesalahan, tidak bias karena apabila suatu informasi yang bias dapat menyesatkan penerima atau pengguna informasi tersebut. Laporan keuangan yang andal terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2016), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan instansi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudiarta (2015), yang menyatakan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah. Begitu juga dengan hasil penelitian dari Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₅: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.12.6 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Kuallitas Laporan Keuangan Pemerintah Lampung Timur

Menurut Mahmudi dalam Penelitian Kiranayanti & Erawati (2014), menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheta (2017), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Kiranayanti & Erawati (2016), yang juga menyatakan bahwa pengendalian intern pemerintah berpengaruh pada hasil informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dan juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pramudiarta (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh pada nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengendalian intern yang dilakukan oleh suatu pemerintah baik pusat maupun daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat dirumuskan hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H₆: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah